



Peran G20 dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan

Putri Diah Juniar Perdamaian*

Universitas Nusa Putra Sukabumi

Abstrak: G20 merupakan forum internasional yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa yang bertujuan untuk mempromosikan koordinasi ekonomi dan kebijakan keuangan di dunia. Salah satu tujuan utama G20 adalah meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan di dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, G20 telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan inisiatif, seperti inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang bertujuan untuk mencegah perusahaan menggunakan lubang hukum dan struktur perpajakan yang tidak seimbang untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan, serta kebijakan yang menyediakan akses bagi investor dan publik terhadap informasi mengenai tata kelola perusahaan. G20 juga telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor keuangan dengan mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang lebih terperinci mengenai struktur kepemilikan dan komposisi kepemilikan saham mereka. Dengan demikian, G20 berperan dalam meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan di dunia.

Kata kunci: G20, Transparansi Keuangan, Tata Kelola

DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v7i4.4139>

*Correspondence: Putri Diah Juniar
Perdamaian

Email: pjuniar4@gmail.com

Received: 08-03-2026

Accepted: 17-04-2026

Published: 25-05-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract: The G20 is an international forum comprising 19 countries and the European Union that aims to promote global economic coordination and financial policy. One of the G20's primary objectives is to enhance financial transparency and corporate governance worldwide. To achieve these goals, the G20 has issued several policies and initiatives, such as the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) initiative, which aims to prevent companies from using legal loopholes and unbalanced tax structures to reduce their tax liabilities, as well as policies that provide investors and the public with access to information regarding corporate governance. The G20 has also issued policies aimed at improving transparency and accountability in the financial sector by requiring companies to provide more detailed information regarding their ownership structures and shareholding compositions. Thus, the G20 plays a role in enhancing financial transparency and corporate governance worldwide.

Keyword: G20, Financial Transparency, Governance

Pendahuluan

Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi salah satu peristiwa yang menunjukkan pentingnya transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia. Krisis tersebut dipicu oleh lemahnya pengawasan, rendahnya keterbukaan informasi keuangan, serta praktik tata kelola perusahaan yang kurang baik pada sejumlah institusi keuangan global. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya kepercayaan investor, kerugian yang besar bagi berbagai pihak, serta terganggunya stabilitas ekonomi secara global. Peristiwa ini mendorong berbagai negara untuk

meningkatkan perhatian terhadap pentingnya sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, transparansi keuangan dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi aspek yang sangat penting bagi perusahaan. Transparansi keuangan merupakan keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, regulator, dan masyarakat. Sementara itu, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam rangka menciptakan pengelolaan perusahaan yang efektif dan bertanggung jawab. Menurut [OECD \(2015\)](#), tata kelola perusahaan merupakan seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Penerapan transparansi keuangan dan GCG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor serta meminimalkan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak internal perusahaan. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik juga mampu menciptakan budaya keterbukaan, akuntabilitas, dan kejujuran dalam aktivitas perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian [Al-Ahdal dkk. \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menciptakan budaya kesadaran dan transparansi dalam perusahaan. Penelitian [Mahrani dan Soewarno \(2018\)](#) juga menjelaskan bahwa sistem tata kelola yang kuat mampu melindungi kepentingan pemegang saham dan meningkatkan kepercayaan para investor.

Dalam upaya memperkuat stabilitas ekonomi global pasca krisis keuangan, G20 dipandang sebagai forum internasional yang memiliki peran penting dalam regulasi dan kerja sama ekonomi global. Forum ini terdiri atas 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang menguasai lebih dari 80% perekonomian global. Keberadaan G20 mendapat dukungan dari berbagai organisasi internasional dan regional karena dinilai mampu menjadi wadah koordinasi dalam mengatasi permasalahan ekonomi dunia, termasuk dalam mendorong peningkatan transparansi keuangan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Berbagai kebijakan dan kerja sama yang dilakukan G20 diarahkan untuk memperkuat sistem keuangan global melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan maupun lembaga keuangan. Namun demikian, peran G20 dalam meningkatkan transparansi keuangan dan penerapan GCG masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak menilai bahwa kebijakan G20 mampu meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa implementasinya masih belum optimal di beberapa negara anggota.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara transparansi keuangan dan *Good Corporate Governance*. Penelitian [Chih dkk. \(2008\)](#) menunjukkan bahwa transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki hubungan yang erat dalam mengurangi penyalahgunaan informasi di dalam perusahaan. Penelitian [Mahrani dan Soewarno \(2018\)](#) menyatakan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat

meningkatkan kepercayaan investor dan memperbaiki kinerja perusahaan. Sementara itu, penelitian [Al-Ahdal dkk. \(2020\)](#) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang efektif.

Meskipun demikian, penelitian mengenai peran G20 dalam mendorong transparansi keuangan dan *Good Corporate Governance* masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan atau hubungan transparansi keuangan dengan kepercayaan investor, sedangkan penelitian yang membahas secara khusus keterkaitan kebijakan G20 terhadap peningkatan transparansi keuangan dan praktik tata kelola perusahaan masih belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran G20 dalam meningkatkan transparansi keuangan dan penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara upaya G20 dalam mendorong transparansi keuangan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi global

Metodologi

Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam karya ini adalah pendekatan yang membantu dalam pengumpulan, interpretasi, dan analisis data literal. Menurut Lamont dan Boduszynski, penelitian kualitatif menggunakan jalur penalaran induktif karena para praktisinya sering mengekstrapolasi klaim teoretis dari data yang diamati. Penelitian kualitatif memiliki kemampuan untuk menghasilkan uraian yang rinci.

Sumber data

Dalam penelitian ini adalah dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data dalam makalah ini bergantung pada penelitian yang dilakukan di internet. Data primer mencakup hal-hal seperti laporan resmi dan siaran pers dari berbagai lembaga dan otoritas. Data sekunder juga dapat berasal dari sumber-sumber seperti publikasi ilmiah yang diterbitkan, artikel berita, dan media berita. Oleh karena itu, tujuan dari karya ini adalah untuk menawarkan analisis yang komprehensif. Model yang diusulkan oleh [John J. Kirton](#) akan digunakan dalam karya ini. Menurut buku Kirton "G20 Governance for a Globalised World," ada empat kerangka teoritis yang telah digunakan untuk meneliti kepemimpinan G20. Setidaknya ada empat perspektif ilmiah tentang G20, menurut penjelasan Kirton yang menyeluruh: redundansi, penolakan, penguatan, dan penggantian.

1. *Redundant*: G20 dianggap sebagai forum yang tidak diperlukan karena negara-negara yang tergabung dalam G20 juga tergabung dalam organisasi lain seperti OECD atau G7.

2. *Rejection*: Beberapa negara atau kelompok menolak G20 karena dianggap tidak representatif atau tidak efektif dalam mengatasi masalah global.
3. *Reinforcement*: G20 dianggap sebagai forum yang dapat menguatkan kerja sama ekonomi dan keuangan antar negara, serta memperkuat peran negara-negara dalam mengatasi masalah global.
4. *Replacement*: G20 dianggap sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan forum ekonomi dan keuangan lainnya, seperti G7 atau G8, karena lebih representatif dan efektif dalam mengatasi masalah global.

Kirton menyatakan bahwa pandangan ini mungkin tidak mutlak benar atau salah, tetapi lebih merupakan sudut pandang yang berbeda-beda dari berbagai pihak terkait dengan peran G20 dalam dunia ekonomi dan keuangan global. Sehingga Kirton memperkenalkan suatu model yang dinamakan "systemic hub model" untuk menganalisis tata kelola G20 dalam meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. Model ini mencakup enam dimensi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja institusional G20, yaitu:

1. *Representativeness*: tingkat kerepresentatifan negara-negara yang tergabung dalam G20 dalam mengatasi masalah transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan.
2. *Inclusiveness*: tingkat keberlanjutan dan kepartisipasian negara-negara yang tidak tergabung dalam G20 dalam proses keputusan G20 dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan.
3. *Effectiveness*: tingkat efektifitas G20 dalam meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.
4. *Efficiency*: tingkat efisiensi G20 dalam mengelola sumber daya dan proses keputusan dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan.
5. *Legitimacy*: tingkat legitimitas G20 dalam masyarakat global dan diakui oleh negara-negara yang tergabung dalam G20 dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan.
6. *Accountability*: tingkat kewajiban dan tanggung jawab G20 dalam melaporkan hasil dan proses keputusannya kepada negara-negara yang tergabung dalam G20 dan masyarakat global dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan.

Model ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja institusional G20 dalam meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. Studi ini akan meneliti kerja sama G20 dalam mempromosikan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan menggunakan enam dimensi yang disebutkan di atas. Namun, ciri-ciri berikut ini menunjukkan proses koalisi diplomatik yang telah berkembang menjadi tata kelola global G20: Pertama, setiap negara akan memimpin. Kedua, setiap negara dapat setuju atau tidak setuju. Ketiga, koalisi akan dibentuk dengan cepat sebagai respons terhadap tantangan baru, terlepas dari apakah tantangan tersebut sesuai dengan kategori yang sudah ada atau tidak. Keempat, bahkan negara-negara terkuat pun akan menyesuaikan diri dan mengikuti penilaian kelompok tersebut. Studi ini akan meneliti kinerja G20 secara detail, dengan tujuan mempercepat pemulihan ekonomi global dan meningkatkan transparansi keuangan dengan menempatkan G20 sebagai penentu tata kelola global.

Hasil dan Pembahasan

Kinerja Institusional G20 dalam meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan

G20 adalah sebuah forum internasional yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan ekonomi global. Forum ini mencakup 19 negara dan Uni Eropa yang terlibat dalam diskusi tentang masalah ekonomi global. G20 juga telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan, sehingga memberikan keuntungan bagi semua pihak.

G20 telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. Inisiatif ini mencakup pengembangan standar akuntansi, pengawasan keuangan, dan peningkatan akses informasi. Inisiatif ini juga mencakup pengembangan standar transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Ini akan membantu memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

G20 telah mengembangkan dan mengadvokasi sejumlah isu yang berkaitan dengan transparansi keuangan sebagai bagian dari misinya sebagai forum antar pemerintah yang berfokus pada kerja sama di bidang keuangan dan ekonomi dunia. Dalam upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan dalam transaksi keuangan internasional, G20 dan OECD telah bekerja sama erat sejak tahun 2008. Dengan tujuan memperkuat perjanjian, konvensi, dan kolaborasi internasional, beberapa negara telah bekerja sama untuk mempromosikan Forum Global tentang Pencucian Uang, Penghindaran Pajak, Surga Pajak, Konvensi Penghindaran Pajak Berganda (DTC), dan Perjanjian Pertukaran Informasi Pajak (TIEA).

Menurut para pemimpin G20, harus ada lebih banyak keterbukaan dan berbagi informasi yang menyeluruh, dan upaya global saat ini juga perlu diperkuat. Beberapa putusan yang dibuat di Los Cabos menunjukkan hal ini: Pertama, mengizinkan OECD untuk memberikan data dan laporan tentang transfer uang ilegal. Kedua, mendorong negara-negara lain untuk bergabung dengan MFAA, yang merupakan singkatan dari Konvensi Multilateral tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pajak. Terakhir, kami mendukung pengesahan kembali mandat Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF). Rencana Aksi tentang Pengurangan Basis Pajak dan Pengalihan Keuntungan (BEPS), yang disusun oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bekerja sama dengan G20, sangat penting di antara upaya-upaya ini. Untuk membuat perpajakan multinasional lebih transparan dan mengurangi praktik pajak yang tidak adil, Rencana Aksi ini mengusulkan sejumlah langkah.

Melalui pembuatan berbagai peraturan nasional, rencana ini memerangi pendanaan terorisme, pencucian uang, dan senjata pemusnah massal. Tujuannya adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dunia melalui kolaborasi. Menurut [Guebert](#), G20 masih mendapat dukungan dari organisasi multilateral di seluruh dunia.

Kelompok Dua Puluh (G20) dengan cepat memantapkan dirinya sebagai tempat utama bagi para pemimpin dunia untuk berkumpul dan membahas kerja sama ekonomi hanya setelah tiga pertemuan puncak. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Dana

Moneter Internasional, FSB, OECD, dan ILO, yang semuanya hadir di pertemuan puncak tersebut, menerima pernyataan ini dengan persetujuan atau persetujuan tanpa keberatan. Selain itu, menurut [Schirm](#), G20 berhasil mencapai konsensus bahwa semua negara perlu menerapkan paket stimulus nasional untuk meningkatkan permintaan di pasar dan mencegah resesi setelah krisis keuangan tahun 2008. [Stefan A. Schirm.\(2011\)](#).

G20 telah menyepakati beberapa inisiatif dan perjanjian untuk meningkatkan transparansi keuangan global, seperti perjanjian untuk menghilangkan penyembunyian dana asing (*Common Reporting Standard*), dan upaya untuk mencegah pendanaan terorisme melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi keuangan. Ada juga beberapa organisasi internasional yang bekerja sama dengan G20 untuk meningkatkan transparansi keuangan, seperti Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Dewan Keuangan Internasional (IFI).

Studi ini menggunakan enam dimensi Kirton sebagai indikator kinerja sistemik G20 untuk memahami kinerja kelembagaan G20 dalam upayanya menghidupkan kembali ekonomi global, khususnya dalam meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. Keenam dimensi tersebut adalah, *Representativeness, Inclusiveness, Effectiveness, Efficiency, Legitimacy, Accountability*.

Pertama, *Representativeness* yang mengukur tingkat kerepresentatifan negara-negara yang tergabung dalam G20 dalam mengatasi masalah transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. *Representativeness* mencakup dua aspek utama, yaitu kelengkapan dan keseimbangan. Kelengkapan mengacu pada kehadiran negara-negara yang berbeda dalam G20, sementara keseimbangan mengacu pada perwakilan negara-negara yang berbeda dalam G20. Prestise menjadi bagian dari G20, memimpin, atau menjadi tuan rumah KTT dianggap dapat mengimbangi pengeluaran moneter. Karena tidak adanya sekretariat tetap, G20 bergantung pada negara yang saat ini memimpin kelompok tersebut untuk menangani tugas-tugas kesekretariatan. Negara ini juga bertanggung jawab untuk merencanakan KTT tahunan.

Contoh peristiwa yang dapat menunjukkan *representativeness* dalam G20 adalah ketika negara-negara yang tidak tergabung dalam G20 tetapi memiliki pengaruh ekonomi yang besar di dunia, seperti India dan Brasil, diinvitasi untuk menjadi anggota tetap G20 pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa G20 telah memperhatikan kelengkapan dan keseimbangan dalam perwakilannya, sehingga lebih representatif dalam mengatasi masalah transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan.

Kedua, *Inclusiveness* yang mengukur tingkat keberlanjutan dan kepartisipasian negara-negara yang tidak tergabung dalam G20 dalam proses keputusan G20 dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. *Inclusiveness* mengacu pada tingkat partisipasi negara-negara yang tidak tergabung dalam G20 dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan G20 dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. Aspek ini seringkali mudah terlihat dari KTT G20 sebelumnya. Pertemuan dengan negara-negara berkembang dan negara-negara kecil untuk membahas dan berkonsultasi tentang transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan adalah peristiwa yang menunjukkan bahwa G20 bersifat inklusif. Pertimbangan KTT G20 2019 di Osaka,

Jepang. Indonesia mengadakan enam pertemuan bilateral di samping acara utama, dengan negara-negara seperti Australia, Korea Selatan, Tiongkok, Arab Saudi, India, dan Turki. Retno LP Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia, mengatakan bahwa ada 16 permintaan bilateral, tetapi keterbatasan waktu membuat implementasinya menjadi sulit.

Ketiga, *Effectiveness* yang mengukur tingkat keefektifan G20 dalam mencapai tujuannya dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. *Effectiveness* mengacu pada tingkat kesuksesan G20 dalam mencapai sasaran dan tujuannya dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. peristiwa yang dapat menunjukkan *effectiveness* dalam G20 adalah ketika G20 membuat dan menerapkan program-program baru untuk meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan, dan program-program tersebut memberikan hasil yang positif dan membuat perusahaan lebih transparan dan terkelola dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa G20 efektif dalam mencapai tujuannya dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. Untuk mencegah kerusakan jangka panjang pada ekonomi global, G20 telah berjanji untuk menawarkan dukungan signifikan kepada bisnis, termasuk alokasi modal dan likuiditas. Sekitar 15% dari PDB di negara-negara maju G20 dialokasikan untuk bantuan keuangan bagi perusahaan, sedangkan hanya 7,5% dialokasikan untuk bantuan bagi entitas non-bisnis. Demikian pula, di antara negara-negara berkembang G20, intervensi fiskal terkait bisnis mencapai hampir 4% dari PDB, sementara dukungan non-bisnis mencapai sekitar 2,5% dari PDB.

Tabel 1. Komitmen Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, 18 Juli 2020

No	Isu/ Permasalahan	Jumlah komitmen
1	Regulasi keuangan	7
2	Kesehatan	6
	Terorisme	6
4	Pembangunan	4
5	Perpajakan	2
6	Reformasi Lembaga Keuangan Internasional	2
7	Infrastruktur	2
8	Kebijakan makroekonomi	1
9	Perdagangan Internasional	1
10	Kebijakan Sosial	1
11	Kerja Sama Internasional	1

Sumber: [G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. 2020c. Communiqué \[18 July 2020\]. G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting](#)

Tabel 1. menunjukkan bahwa Regulasi keuangan menjadi prioritas utama di antara komitmen G20, diikuti oleh langkah-langkah di bidang kesehatan dan kontra-terorisme. Jika G20 serius dalam mempercepat pemulihan ekonomi dunia dan meningkatkan transparansi keuangan serta tata kelola perusahaan, maka inilah bidang-bidang yang telah mereka prioritaskan.

Keempat, *Efficiency* yang mengukur tingkat efisiensi G20 dalam mengelola sumber daya dan proses keputusan. *Efficiency* mengacu pada tingkat efisiensi dalam menggunakan sumber daya dan proses keputusan dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. peristiwa yang dapat menunjukkan *efficiency* dalam G20 adalah ketika G20

mengelola sumber daya dan proses keputusan dengan efisien dan efektif, seperti dengan mengoptimalkan sumber daya dan membuat proses keputusan yang cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa G20 mampu mengelola sumber daya dan proses keputusan dengan efisien dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. Selama sesi ini, kami membahas cara-cara untuk meningkatkan kemampuan perusahaan milik negara dalam mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta tanggung jawab mereka dalam memerangi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati melalui pelaporan dan keterbukaan. Kemajuan lebih lanjut pada Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD diharapkan sebagai hasil dari kesimpulan forum ini.

Kelima, *Legitimacy* yang mengukur tingkat legitimasi G20 dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. Legitimacy mengacu pada tingkat diterima dan diakui oleh masyarakat dan stakeholders terkait dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. Untuk menjaga komitmen G20 terhadap kolaborasi tetap kuat, kepresidenan saat ini biasanya menyerahkan mandat kepada kepresidenan berikutnya, sehingga agenda tetap sama pada pertemuan puncak berikutnya. Dengan membahas kepentingan dan ambisi para pemangku kepentingan dan publik di bidang-bidang seperti transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan, misalnya, acara-acara G20 membuktikan legitimasinya dengan menerapkan kebijakan dan program yang disetujui dan didukung oleh pihak-pihak terkait. Ini membuktikan bahwa publik dan para pemangku kepentingan memandang G20 sebagai organisasi yang sah yang mempromosikan tata kelola perusahaan dan transparansi keuangan. Untuk mencegah anggota menyimpang, mekanisme ini terkait erat dengan proses pengembangan setiap kategori komitmen yang telah ditetapkan. Publik yang lebih luas (negara-negara non-anggota G20) juga dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kelembagaan G20 melalui lensa para pemain rasional. Mendukung dimensi ini adalah tingkat kepatuhan negara-negara anggota. Sebagai contoh, Indonesia menerapkan program untuk mendukung 12 juta UMKM produktif, dengan masing-masing menerima 2,4 juta rupiah, sebagai respons terhadap komunikasi dari para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 tentang bantuan untuk sektor UMKM. Dukungan kredit dan subsidi bunga juga diberikan oleh Indonesia kepada UMKM. Sejalan dengan hal ini, negara-negara anggota berasumsi bahwa negara-negara anggota lainnya akan mengikuti jejak jika negara mereka sendiri memenuhi kewajibannya. Akibatnya, G20 menjadi panggung tempat hak dan tanggung jawab negara-negara anggota diatur. Jika kepatuhan suatu negara terhadap kewajibannya membuahkan hasil, kemungkinan besar hal itu juga akan memengaruhi negara-negara di luar arena tersebut. Akibatnya, negara-negara yang bukan bagian dari G20 akan mengikuti jejak dan mengadopsi kebijakan dan prosedur yang sama.

Keenam, *Accountability* yang mengukur tingkat tanggung jawab G20 dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. Accountability mengacu pada tingkat bertanggung jawab dan transparan dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan program yang diambil dalam hal transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. G20 menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas ketika menghasilkan laporan tahunan yang terbuka dan jujur tentang keuangan kelompok tersebut dan

memberikan informasi yang dibutuhkan publik dan pemangku kepentingan terkait untuk membuat keputusan yang tepat tentang tata kelola perusahaan dan transparansi keuangan. G20 telah membuktikan dirinya sebagai kelompok yang akuntabel dan terus terang dalam hal pengungkapan keuangan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menegakkan akuntabilitas dan transparansi, Development Working Group (DWG) merumuskan laporan pertanggungjawaban pertamanya pada tahun 2013. Dokumen ini juga membantu DWG memetakan dan memantau sektor-sektor pembangunan untuk menyusun strategi lebih lanjut dalam mempersempit kesenjangan pembangunan. Dengan pandangan ini, DWG menetapkan Kerangka Akuntabilitas pada tahun 2014 sebagai pedoman untuk merumuskan laporan tahunan. Sejak Saat itu, DWG telah menerbitkan laporan pertanggungjawaban tahunan atas komitmen pembangunan G20 yang telah dibuat sejak pembentukan DWG pada tahun 2010. Pada tahun 2019, para anggota DWG menyerukan penyederhanaan dan modernisasi proses akuntabilitas dan dokumen laporan. DWG menyimpulkan diskusi tersebut dan menetapkan Kerangka Akuntabilitas Modernisasi G20 pada tahun 2020 yang menggabungkan Pembaruan Tahunan Rencana Aksi G20 untuk Agenda 2030 dan Laporan Akuntabilitas DWG ke dalam satu dokumen.

Pada tahun 2020, DWG juga membuat portal online. Awalnya, portal ini dibuat untuk mempublikasikan semua dokumen laporan pertanggungjawaban. Namun, untuk mengoptimalkan potensinya secara penuh, situs web ini digunakan untuk mempublikasikan semua dokumen dan pertemuan DWG untuk terjemahan repositori publik.chine.

Dari sudut pandang luar, kapasitas G20 untuk mempertahankan karakter uniknya sambil berfungsi sebagai entitas yang lebih besar dalam jaringan global sangatlah penting. Komunike para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyatakan bahwa sebagai respons terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi global, G20 telah berkolaborasi dan menyinkronkan upayanya dengan organisasi internasional terkait, seperti IMF, Bank Dunia, WTO, FSB, OECD, dan WHO. Sejak awal, G20 telah mempertahankan kemitraan dengan organisasi multilateral lainnya. Hal ini terutama berlaku untuk lembaga Bretton Woods, yang telah aktif sejak KTT Keuangan dan Bank Sentral G20 pertama pada tahun 1999. Semua orang diundang ke setiap KTT G20, termasuk kepala Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Fakta bahwa IMF secara konsisten menyetujui hasil diskusi G20 meskipun G20 hanyalah sebuah forum menunjukkan betapa berkomitmennya kedua organisasi tersebut untuk mempertahankan hubungan yang produktif.

G20 secara konsisten dan tegas telah mengatasi krisis dan tantangan global, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, menunjukkan kepemimpinannya yang tak tertandingi. Kelompok G20 telah membentuk mekanisme resolusi berbasis forum yang dapat memainkan peran utama dalam membentuk diplomasi global. Organisasi internasional melihat G20 dan G8 sebagai alat yang berguna untuk membentuk respons nasional terhadap tantangan global. [Guebert, Jenilee \(2010\).](#)

Simpulan

G20 atau *Group of Twenty* adalah tempat pertemuan bagi 20 ekonomi terbesar di dunia. Dalam hal meningkatkan tata kelola perusahaan dan transparansi keuangan, G20 sangat penting, menurut enam pilar model pusat sistemik Kirton. Dalam hal meningkatkan tata kelola perusahaan dan transparansi keuangan, G20 dapat menjadi sekutu yang membantu. G20 juga terlibat dalam memastikan bahwa tata kelola perusahaan dan transparansi keuangan itu sah dan bahwa orang-orang dimintai pertanggungjawaban.

Namun, model systemic hub Kirton juga menunjukkan bahwa ada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam peran G20 dalam meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan, seperti efisiensi dan *accountability*. Oleh karena itu, peran G20 dalam meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan harus terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk memastikan bahwa transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan dapat diterapkan secara efektif dan diterima oleh masyarakat dan stakeholders terkait.

Ekonomi global dan ekonomi negara-negara anggota G20 saling bergantung, dan kinerja G20 akan menentukan hal ini. Karena kerja sama diimplementasikan melalui jaringan di seluruh dunia, dapat diklaim bahwa kemakmuran dan keseimbangan 20 negara anggota G20 akan menjamin stabilitas ekonomi global. Negara-negara G20 telah berjanji untuk meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan, di antara bidang-bidang lainnya, sebagai imbalan atas prestise yang didapat dari menjadi bagian dari kelompok tersebut. Tindakan serupa akan diambil oleh negara-negara non-anggota G20 sebagai respons terhadap kepatuhan negara-negara anggota G20.

Referensi

- Ahmad, Daniri. 2005. Konsep dan Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Konteks Indonesia. Indonesia: Ray Indonesia.
- Ajay, R., dan Madhumathi, R. (2015) 'Institutional Ownership and Earnings Management in India. *Indian Journal of Corporate Governance*', 8(2), 119–136. <https://doi.org/10.1177/0974686215602368>.
- Al-ahdal, W. M. et al. (2020) 'The impact of corporate governance on financial performance of Indian and GCC listed firms: An empirical investigation', *Research in International Business and Finance*. Elsevier, 51(August 2019), p. 101083. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101083>.
- Ardila, G., Burrohman, M., Mandayanti, E., Putri, V. A., & Hidayat, M. (2022). G-20 dan Transparansi Perpajakan Internasional: Memperkuat Peran Indonesia dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 477–483.
- Astuti, W. R. D. (2020). Kerja Sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(2), 131–148.

- Chih, H. L., Shen, C. H. dan Kang, F. C. (2008) 'Corporate social responsibility, investor protection, and earnings management: Some international evidence', *Journal of Business Ethics*, 79(1–2), pp. 179–198. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9383-7>.
- Christopher Lamont and Mieczyslaw P. Boduszynski. 2020. *Research Methods in Politics and International Relations*. London: SAGE Publications Ltd.
- Detiknews. 2019. Indonesia Terima 16 Permintaan Pertemuan Bilateral di Sela KTT G20. Juni 26. <https://news.detik.com/berita/d-4601315/indonesia-terima-16-permintaan-pertemuan-bilateral-di-sela-ktt-g20>
- Dwgg20.org. The G20 Development Working Group. Diakses pada 2023, dari <https://dwgg20.org/about-accountability>
- Fiskal.kemenkeu.go.id. Anggota G20 Reviu Tata Kelola Perusahaan Dan Pasar Modal Dalam Hadapi Tantangan Perubahan Iklim Dan Risiko Sosial. Diakses pada 2023, dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/419>
- G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. 2020c. Communiqué [18 July 2020]. G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting.
- G20.utoronto.ca. 2003. *THE GROUP OF TWENTY: A HISTORY*. Diakses pada 2023, dari <http://www.g20.utoronto.ca/docs/g20history.pdf>
- Guebert, Jenilee. 2010. "The G8, G20 and Multilateral Organizations: Cooperating and Collaborating." *Studia Diplomatica* (Egmont Institute), 63(2), 53–69.
- Insignia: *Journal of International Relations*, 3(02), 1–12.
- Jenilee Guebert. 2010. "The G8, G20 and Multilateral Organizations: Cooperating and Collaborating." *Studia Diplomatica* (Egmont Institute), 63(2), 53–69.
- John J. Kirton. 2016. *G20 Governance for a Globalized World*. New York: Routledge.
- Kompas. 2020. Erick Thohir: Bantuan Rp 2,4 Juta Per UMKM Disalurkan dalam 1-2 Minggu ke Depan. Agustus 10. <https://money.kompas.com/read/2020/08/10/203000526/erick-thohir--bantuan-rp-2-4-juta-per-umkm-disalurkan-dalam-1-2-minggu-ke>
- Laporan Tim Riset G20. "Peran Indonesia Dalam G20: Latar Belakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia". Friedrich Ebert Stiftung., Jakarta. 2011.
- Mahrani, M. dan Soewarno, N. (2018) 'The effect of *Good Corporate Governance* mechanism and corporate social responsibility on financial performance with earnings management as mediating variable', *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), pp. 41–60. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0008>

-
- Muindro Renyowijoyo. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- OECD (2015) G20/OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing.
<https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf>
- Pieritz, L. R. (2021). Peran Tata Kelola Perusahaan Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. Accounting and Business Information Systems Journal, 9(2).
- Raha, S. dan Prabhu, S. (2005) 'Corporate Governance: Three Views', 30(4), pp. 1–10.
- Stefan A. Schirm. 2011. The G20, Emerging Powers, and Transatlantic Relations. Washington D.C.: German Marshall Fund of the United States, pp. 3–5.
- Summit Declaration on Financial Markets and the World Economy, 15 November 2008.
- Utami, A. T. (2016). Analisis Efektivitas G20 Dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008.